**RISALAH**

**SOSIALISASI**

**PELAPORAN EITI INDONESIA 2010-2011**

Hari / Tanggal : **Rabu / 09 Oktober 2013**

Waktu : 09:30 – 12:30

Tempat : Hotel Mercure, Jl. Ahmad Yani Km 2 No. 98, Banjarmasin.

Agenda : **Sosialisasi Pelaporan EITI Indonesia Tahun 2010-2011**

Peserta Sosialisasi:

Dari 42 entitas dan 6 instansi yang diundang, peserta yang menghadiri sosialisasi adalah:

**Pemerintah**

Provinsi:

1. Dinas Pertambangan dan Energi Prov. Kalimantan Selatan, diwakili oleh A. Gunawan Harjito, dan Zulkifli.

Kabupaten:

1. Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut, diwakili oleh M. Jumaidi.
2. Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kotabaru, diwakili oleh AM. Zen.
3. Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu, diwakili oleh Kisrayamanansyah .
4. Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Banjar, diwakili oleh Sukamto.

**Perusahaan / PKP2B**

1. PT. Antang Gunung Meratus: Tony T, dan Sri R.
2. PT. Bahari Cakrawala Sebuku: Yanuar Ekaputra.
3. PT. Bangun Benua Persada: Dadang Zulhijar.
4. PT. Jorong Barautama Greston: Ronald, Hadirin Azhar, dan Widiyanto.
5. PT. Kadya Caraka Mulia: Bambang Winanto, dan Mochamad Sopian.

**Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP)**

1. PT. Amanah AAM: Slamet Hariadi.
2. PT. Anugerah Borneo Coal: Lubis & Bernard
3. PT. Anugerah Sukses Gemilang: Ilham.
4. PT. Astri Mining Resources: Andi Setiawan.
5. PT. A. T. S. : Agus H.
6. PT. Bhumi Rantau Energy: Agus Subiyanto.
7. PT. B. I. B.: Hary Indrianto.
8. KUD Desa Makmur: Amirudin.
9. PT. E.B.L.: . Purjuniadi
10. KUD Gajah Mada: . Suparno, dan Boy.
11. CV. Harapan Binuang Muda: . Pofendi Cahyono.
12. PT. Indoasia Cemerlang: Candra, dan Shaid.
13. PT. Indo Tambang Sukses: Setianistitianto Arief W.
14. CV. Karyati: Netty H. dan Faridatul U.
15. PT. Lianganggang Cemerlang: . Mohammad Zulkarnain.
16. PT. Makmur Bersama: Lukman Hakim,S.Sos, Rizal, dan Maharani.
17. PT. Multi Bara Persada: Adi Darma.
18. CV. Putra Parahyangan Mandiri: Mahlan Noor
19. PT. Surya Sakti Darma Kencana: Harijanto.
20. PT. Tunas Inti Abadi: Asha Dicka P.
21. PT. Usaha Baratama Jesindo: Yuwono.

**Sekretariat EITI Indonesia**

1. Sekretaris Tim Transparansi, Emy Perdanahari
2. Plh Wakil Sekretaris Tim Transparansi, Ambarsari Dwi Cahyani
3. Regulatory Specialist, Ronald Tambunan
4. Revenue-II Specialist, Anita Pascalia
5. Spesialis TI, M. Tri W.
6. Malidu Ahmad
7. Yuliana
8. Eka.
9. Hadi Purnama

**Pembawa Acara** **(MC)** : Malidu Ahmad

**Risalah Sosialisasi**

**Pembawa Acara Malidu Ahmad**, setelah mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi dari para peserta pada acara sosialisasi ini, mempersilakan kepada Ketua Sekretariat EITI Indonesia Dr. Emy Perdanahari menyampaikan Kata Sambutan.

**Dr. Emy Perdanahari** dalam sambutannya menyampaikan secara garis besar hal-hal sebagai berikut:

1. Bersyukur kepada Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya, kita semua dapat hadir pada acara yang sangat bermanfaat bagi terwujudnya *good governance* bagi Negara Republik Indonesia yang kita cintai.
2. EITI (*Extractive Industry Transparency Initiative*) atau Inisiatif Transparansi Industri

Ekstraktif adalah suatu standar global mengenai transparansi pendapatan negara

dari industri ekstraktif (minyak, gas dan pertambangan). Standar ini berpusat pada

**rekonsiliasi** atas laporan **pembayaran** yang dilakukan oleh perusahaan industri

ekstraktif kepada Negara, dengan laporan **penerimaan** oleh pemerintah dari perusahaan

industri ekstraktif.

1. Proses rekonsiliasi dilakukan oleh rekonsiliator independen dan diawasi oleh kelompok

multi-pihak atau *Multi Stakeholder Group* (MSG) yang terdiri dari perwakilan pemerintah

pusat, Pemerintah daerah, perusahaan industri ekstraktif, serta kelompok masyarakat

sipil. Hasil rekonsiliasi menjadi laporan yang wajib untuk dipublikasikan sebagai wujud

dari transparansi industri ekstraktif.

1. EITI telah diterapkan di 39 negara anggota EITI Internasional, termasuk Indonesia yang

telah diterima sebagai negara kandidat pada tanggal 19 Oktober 2010. Keikutsertaan

Indonesia di dalam EITI adalah berdasarkan surat permohonan dari Menteri Koordinator

(Menko) Bidang Perekonomian kepada Ketua Dewan EITI Internasional tanggal 14

September 2010.

1. Landasan hukum pelaksanaan EITI Indonesia adalah Peraturan Presiden (Perpres)

No. 26 tahun 2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah

Yang Diperoleh Dari Industri Ekstraktif.

Berdasarkan Perpres tersebut, pelaksanaan EITI dilakukan oleh Tim Transparansi

Industri Ekstraktif (Tim Transparansi) yang berkedudukan dan bertanggung jawab

langsung kepada Presiden. Tim Transparansi terdiri dari Tim Pengarah dan Tim

Pelaksana.

1. Disampaikan bahwa Laporan Pertama EITI Indonesia (tahun pelaporan 2009) telah selesai disusun pada bulan April tahun 2013 dan dipublikasikan melalui websiti EITI Indonesia www.eiti.ekon.go.id. Sesuai ketentuan EITI, laporan Kedua EITI Indonesia (tahun pelaporan 2010-2011) sudah harus terbit pada akhir tahun 2013.
2. Juga disampaikan bahwa dari pengalaman pelaksanaan EITI tahun pelaporan

2009 ada beberapa perusahaan yang tidak antusias melaksanakan EITI karena

kurangnya pemahaman mereka mengenai EITI. Bahkan dari hasil sosialisasi yang kami

lakukan beberapa waktu yang lalu di daerah Kalimantan Timur, ada wakil perusahaan

yang bahkan belum mengetahui keberadaan EITI. Hal-hal tersebut di atas menjadi salah

satu faktor yang menyebabkan penyusunan Laporan Pertama EITI Indonesia tidak dapat

memenuhi target waktu sesuai ketentuan EITI Internasional.

1. Ibu Emy berharap kesempatan sosialisasi kali ini dapat digunakan dengan baik. Dan

alangkah bermanfaat jika begitu selesai acara ini, Bapak dan Ibu dapat langsung

memulai untuk proses pelaporan EITI Indonesia tahap kedua yaitu dengan mengunduh

formulir pelaporan dari website EITI Indonesia serta mengirimkan laporan yang memuat

laporan tahun kalender 2010 dan 2011.

1. Akhirnya, dengan memohon bimbingan dari Allah SWT dan diiringi ucapan Bismillahirahmanirrahim, secara resmi Ibu Emy membuka Acara Sosialisasi pada pagi ini. Semoga acara sosialisasi ini dapat terselenggara dengan baik.

Selanjutnya forum mendengarkan kata sambutan dari dinas pertambangan dan energi, pembawa acara Malidu Ahmad mempersilakan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Selatan yang diwakili oleh Bapak A. Gunawan Harjito menyampaikan Kata Sambutan.

**A. Gunawan Harjito,** menyampaikan sambutan tertulis Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Selatan, dengan butir-butir garis besar sebagai berikut:

* Puji syukur ke hadirat Allah Swt, atas perkanNya kita dapat hador bertemu dalam acara sosialisasi pelaporan EITI Indonesia 2010-2011;
* Dalam pengelolaan SDA selama ini terkesan hanya menguntungkan berbagai pihak. Negara sebagai pemegang hak menguasai atgas SDA dan pemerintah sebagai pengambil kebijakan dan pengawas dalam pengelolaan SDA, dalm perannya belum memihak kepentingan rakyat. Pemanfaatan SDA seharusnya bertujuan untuk memakmurkan rakyat seperti yang diamanatkan Pasal 33 uud 1945, namun realitas yang ada rakyat semakin terpinggirkan, miskin dan tidak berdaya atas bencana ekologi akibat eksploitasi SDA;
* Lahirnya UU No. 4 Tahun 2009 sebagai perbaikan UU No. 11 Tahun 1967, mempunyai semangat yang ingin dibangun seperti adanya tuntutan prinsip-prinsip transparansi, efisiensi, daya saing dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pertambangan;
* Dengan demikian, agar semua stakeholder yang ada dalam hal penguasaan pertambangan, dapat mensejahterakan rakyat, memaksimalkan penerimaan negara dan keuntungan pengusaha serta lingkungan tetap terjaga;
* Dengan lahirnya Perpres No. 26 Tahun 2010, dilihat secara filosofis bahwa pemanfaatan SDA khususnya sumber daya ekstraktif yang tidak dapat diperbarui, seharusnya dilakukan secara efisien dan efektif untuk peningkatan kesejahteraan rakyat, dalam artian pertambangan yang dilakukan harus professional dan modern dengan memperhitungakan fisik, teknis, keuangan, lingkungan hidup pascatambang, dan teknologi;
* Diharapkan, pemanfaatan SDA ekstraktif harus sesuai prinsip-prinsip *Good Governance*, transparansi, *sustainable development,* dan peningkatan daya saing iklim investasi di bidang industry ekstraktif.

Rehat kopi telah dilakukan selama acara berlangsung, maka acara selanjutnya langsung masuk ke Sosialisasi.

**Sosialisasi**

Pada pukul 10:00 WIB, Pembawa Acara (MC) Malidu Ahmad mempersilakan kepada Nara Sumber Ronald Tambunan, dan Ambarsari Dwi Cahyani untuk melakukan Sosialisasi. dengan pemaparan Pemahaman Perpres No. 26 Tahun 2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara, dan pemaparan tentang Pengisian Laporan EITI Indonesia Tahun 2010-2011.

**Bapak Ronald Tambunan** menyampaikan paparannya terlebih dahulu mengenai Pemahaman Perpres No. 26 Tahun 2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah yang Diperoleh dari Industri Ekstraktif, dan Pengenalan EITI. sebagaimana (bahan paparan) terlampir.

Dalam pemaparan, **Bapak Ronald Tambunan** menjelaskan secara garis besar mengenai hal-hal sebagai berikut:

* Menjelaskan pemahaman Perpres 26 Tahun 2010, sampai dengan terbentuk dan bekerjanya Tim Transparansi EITI Indonesia;
* Bekerjanya Sekretariat EITI Indonesia;
* Konteks penerimaan negara dan daerah dari hasil industri ekstraktif antara lain berupa iuran-iuran, royalty, pajak-pajak, dan dividen.

Pemaparan Pak Ronald Tambunan secara seksama dapat dimengerti dan difahami oleh peserta sosialisasi. Satu perusahaan menyampaikan pertanyaan, yaitu:

**Roland**, dari PT. Jorong Barautama Greston, berharap agar perusahaan / PKP2B dibantu juga / penghargaan oleh pemerintah, misalnya soal *illegal mining* karena sudah turut keinginan pemerintah. Forum PKP2B tidak pernah menerima hal semacam itu.

**Ronald Tambunan** memberikan jawaban, bahwa sedianya memang hartus ada penghargaan, atas PNBP, namun terdapat kendala perusahaan-perusahaan dalam kategori C & C (clear & clean). Ke depan dipikirkan akan ada award.

Selanjutnya Pembawa Acara Malidu Ahmad mempersilakan kepada Nara Sumber **Ibu Ambarsari Dwi Cahyani** untuk melakukan Sosialisasi Pelaporan EITI Indonesia Tahun 2010-2011.

**Ibu Ambar Dwi Cahyani** menyampaikan paparannya terlebih dahulu mengenai hal tersebut sebagaimana bahan paparan terlampir, kemudian dilakukan Tanya Jawab.

Dalam pemaparan, Ibu Ambar Dwi Cahyani menjelaskan secara garis besar sebagai berikut:

* Tidak perlu lagi Surat Pengantar tersendiri dari perusahaan karena dalam format formulir telah terdapat bagian sebagai surat pengantar;
* Mengenai penanggung jawab (incharge person), yaitu untuk pengisian formulir, diharapkan adalah orang yang bisa/dapat dikontak setiap waktu diperlukan;
* Menjelaskan bagian-bagian untuk yang dilakukan rekonsiliasi, dan yang tidak dilakukan rekonsiliasi;
* Sesuai UU dan ketentuan yang berlaku, otorisasi dari perusahaan kepada Ditjen Pajak sangat diperlukan untuk mumbuka data pajak yang dibayarkan perusahaan yang bersangkutan;
* Semua NPWP dicantumkan, dengan maksud untuk mengecek jika terjadi kesalahan/kekeliruan pencatatan;
* Dan lainnya.

**Tanya Jawab**

**Andi Setiawan** (PT. Astri Mining Resources)

1. Bolehkah bukti pembayaran pendapatan negara direkam (scan) saja?

 **Ambar,** menjelaskan bahwa hard copy bukti pembayaran cukup,dan hasil/scan juga boleh dikirimkan.

1. **Roland** (PT. Jorong Barautama Gresto), adakah sanksi jika tidak/terlambat melaporkan?

 **Ronald Tambunan** , menjelaskan, sampai saat ini tidak/belum ada sanksi, tapi ibarat kita berada mendapati lampu merah, ya kita berhenti dengan rela. Jadi dengan pelaporan terkesan transparan dan patuh prosedur.

1. **Ilham** (PT. Anugerah Sukses), untuk tanda tangan/penanda tanganan akan menjadi masalah, seperti dipaksa membuat pernyataaan, ini agak menyulitkan, pada hal undang-undang melindungi?

 **Ambarsari** memberikan penjelasan, bukan dipaksa, namun karena ini sudah jadi target laporan, maka jika ada perusahaan yang belum melaporkan maka akan dipublikasikan, yang melapor gtapi tidak lengkap juga akan dipublikasikan, dan perusahaan yang melapor juga dipublikasikan. Ambar menambahkan, otorisasi perlu untuk Ditjen Pajak agar bisa membuka angka-angka pajak, jadi melanggar undang-undang, hanya untuk beberapa pajak yang sudah mereka catat. Hasilnya, akan ditemukan: angkanya ternyata sama, atau lebih kecil, atau sudah masuk rekening lainnya. Apabila tidak tercatat, maka dampaknya akan berpengaruh terhadap bagi hasil daerah.

 **Ronald Tambunan** menambahkan, angka pajak dibuka hanya untuk PPh Badan dan PBB.

1. **Harijanto** (PT. Surya Sakti Darma Kencana), yang secara simple disampaikan berupa copy PPh Badan /PBB apakah tidak menimbulkan bermacam kesan/persepsi, dan royalti 4 triwulan, apakah dimaksudkan untuk kurun waktu 1 Januari-31 Desember?

**Ambarsari** menjelaskan, mekanismenya adalah membandingkan data dari pemerintah dan perusahaan (untuk memastikan), jadi itulah tujuan lembar otorisasi untuk laporan 2010-2011. Ditambahkan **Ronald Tambunan** pula mekanisme transparansi, dimana pemerintah dan perusahaan sama-sama melaporkan. Ditambahkan **Ambarsari,** volume, terkait dengan royalti yang sudah dibayarkan. Formatnya akan bervariasi, sebagai masukan, dipersilakan sesuai dengan format yang diterapkan pada masing-masing perusahaan.

**5. Yuwono** (PT. Usaha Baratama Jesindo), PPh Pasal 25 dan 29 masuk ke negara juga, apakah perlu dilaporkan juga, dan datga ya ng ada pada IUP tidak semua yang transparan, tapi mengapa justeru perusahaan yang transparan sering dikejar petugas pajak?, yang illegal justeru perusahaannya lebih galak, yang tidak bayar ketawa, jadi inilah yang menimbulkan keirian bagi perusahaan yang transparan.

 **Ronald Tambunan** menjawab/mengimbah perushaan janganlah terpengaruh oleh perasaan/keadaan yang ditemui seperti itu. Ke depan yang illegal itu akan dibenahi, dan nanti akan kita pikirkan reward bagi perusahaan yang transparan.

**Ambarsari** menjelaskan, PPh Badan itu cash basis, termasuk jika ada yang kurang bayar tahun sebelumnya, termasuk sebagai yang dilaporkan untuk tahun 2010-2011. Secara materialitas, kontribusi perusahaan ke negara sebesar di atas US$ 500,000.00 atau diatas Rp 4,5 miliar, jumlah itulah yang dilaporkan. Bagi perusahaan yang kontibusinya dibawah jumlah tersebut tidak melaporkan. Diharapkan untuk laporan 2010-2011 akan lebih baik karena sudah ada perubahan UU di bidang pertambangan dan mineral pada 2009, yaitu UU No. 4 Tahun 2009 sebagai perbaikan UU No. 11 Tahun 1967.

**6. Mohammad Zulkarnain** (PT. Lianganggang Cemerlang), apakah sudah ada keterkaitan EITI Indonesia dengan ESDM / Distamben, dan apa kaitan perusahaan C & C dengan EITI.

 **Ronald Tanbunan** menjelaskan ada keterkaitan EITI degan ESDM dimana ESDM menjadi salah satu anggota Tim Pelaksana EITI Indonesia. Sedangkan untuk C & C, tidak ada juga jaminan perusahaan C &C akan mentaati penyampaian laporannya. **Ambarsari** menambahkan sudah ada surat kepada Bupati mohon dukungan agar perusahaan di daerah mentaati penyampaian laporan dalam rangka EITI. Untuk perpanjangan batas waktu penyampaian laporan (semula ditetapkan s.d. 14 Oktober 2014) akan dibahas dalam rapat Tim Pelaksana EITI akhir Oktober. Jadi tetap laporkan dulu saja soft copy berikut lembar pernyataannya.

**7. Candra** (PT. Indoasia Cemerlang), karena data pembayaran royalti banyak, apabila pengisian soft copy pembayaran royalti sudah lengkap, masihkah perlu hard copy-nya dilampirkan?

 **Ambarsari** menjawab, tidak perlu.

Tanya-jawab selesai, sosialisasi selesai, selanjutnya dilakukan acara penutupan.

**Penutupan**

**Ibu Emy Perdanahari,** Ketua Sekretariat EITI Indonesia dalam acara penutupan sosialisasi ini mengungkapkan rasa bangga dan gembira, karena perusahaan tambang di Kalimantan Selatan benar-benar berniat mendukung transparansi dalam rangka EITI. Sosialisasi berlangsung dengan sangat baik, dan perusahaan/undangan yang hadir banyak, Kalsel merupakan yang terbaik dari rangkaian sosialisasi yang telah dilakukan.

Semua pertanyaan yang kritis dan konstruktif sepanjang sosialisasi ini berlangsung merupakan sebagai masukan bagi kami, agar ke depan Indonesia menjadi negara *Compliant EITI* , kita berharap dapat mencapainya seperti negara Timor Leste), sehingga dengan transparansi, amanah UUD 1945 bisa dilaksanakan menjadi kenyataan.

Ibu Emy menyampaikan terima kasih banyak kepada semua peserta dan undangan sosialisasi serta panitia, dan ditunggu laporan dari perusahaan. Akhirnya Ibu Emy menutup acara Sosialisasi ini secara resmi pada pukul 12:30 WITA.

Peserta, Undangan dan Panitia melakukan Foto-Bersama, setelah itu MC mempersilakan semuanya menikmati hidangan makan siang yang telah disediakan Panitia.

 ***Penyusun Risalah: Malidu Ahmad***